

# ANALISIS KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP SISTEM PEMBELAJARAN DARING SAAT PANDEMI COVID-19

ERWIN ASTUTIK

STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Email: erwinastutik99@gmail.com

*(Article History)*

*Received October 9, 2021; Revised December 6, 2021; Accepted March 12, 2022*

## **Abstract: Principal Policy Analysis of Online Learning Systems the Covid-19 Pandemic**

*The current Covid-19 pandemic, which continues until 2021, has had a significant impact on the world of education, thus the majority of schools in Indonesia still use the online learning system. One of them is Sumput and Sarirogo villages. The implications of several policies that have been set by the government regarding the learning system during the pandemic require the leadership of school principals to support online learning. Based on these problems, this study was made to determine the principal's policy on the online learning system during the pandemic. The research approach used is a descriptive quantitative method with the research instrument in the form of a questionnaire. While the data analysis used SPSS Version 16. Based on the results of the study, it was found that the form of policy that was mostly taken by school principals was the resource indicator with details, from 5 principals consisting of SDN Sumput, SDN Sarirogo, MI Nahdlatul Ulama Sarirogo, Darul Fikri Sarirogo Integrated Islamic Junior High School and Darul Fikri Sarirogo Integrated Islamic High School, 3 of which (SDN Sumput, Darul Fikri Sarirogo Integrated Islamic Junior High School and Darul Fikri Sarirogo Integrated Islamic High School) had the highest scores on the resource indicator. Meanwhile, the lowest form of policy is on social, economic and political indicators with details, out of 5 principals all have the lowest scores on social, economic and political indicators.*

**Keywords:** *Policy, Principal, Covid-19 Pandemic, Online Learning System*

## **Abstrak: Analisis Kebijakan Kepala Sekolah terhadap Sistem Pembelajaran Daring Saat Pandemi Covid-19**

Wabah Covid-19 sampai saat ini turut memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia Pendidikan, sehingga mayoritas sekolah di Indonesia masih menggunakan sistem pembelajaran daring. Salah satunya yaitu Desa Sumput dan Sarirogo. Implikasi dari beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait sistem pembelajaran saat pandemi, menuntut kepemimpinan kepala sekolah untuk mendukung pembelajaran daring. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dibuat untuk mengetahui kebijakan kepala sekolah terhadap sistem pembelajaran daring saat pandemi. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif deskriptif dengan instrumen penelitian berupa kuesioner dengan analisis data menggunakan SPSS Versi 16. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa bentuk kebijakan yang paling banyak diambil oleh kepala sekolah yaitu

pada indikator sumber daya dengan rincian dari 5 kepala sekolah yang terdiri dari SDN Sumput, SDN Sarirogo, MI Nahdlatul Ulama Sarirogo, SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sarirogo, dan MA Islam Terpadu Darul Fikri Sarirogo. 3 diantaranya (SDN Sumput, SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sarirogo dan MA Islam Terpadu Darul Fikri Sarirogo) memiliki skor tertinggi pada indikator sumber daya, sedangkan bentuk kebijakan paling rendah yaitu pada indikator sosial, ekonomi, dan politik dengan rincian dari 5 kepala sekolah semuanya memiliki skor terendah pada indikator sosial, ekonomi, dan politik.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Kepala Sekolah, Pandemi Covid-19, Sistem Pembelajaran Daring

## PENDAHULUAN

**W**abah Covid-19 telah melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia (Mansyur, 2020), sehingga pemerintah membuat kebijakan *stay at home* (diam di rumah) (Ratu, Uswatun, dan Pramudibyanto, 2020). Adanya wabah tersebut turut menyumbangkan dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan manusia, seperti pada sektor ekonomi, politik, sosial, dan dunia pendidikan turut merasakan dampaknya (Engkus, 2019). Lebih dari 13 negara memutuskan untuk menutup sementara sekolah dengan batasan waktu yang tidak ditentukan. *United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan *platform* pendidikan dalam jaringan (DARING) atau *online* sehingga kegiatan belajar mengajar akan tetap berlangsung (Kemendikbud, 2020).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas ini tidak sepenuhnya sama dengan pembelajaran tatap muka sebelum adanya pandemi Covid-19. Skema pembelajaran diatur dengan kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan selama dua jam dengan jumlah peserta didik 25% serta dua kali pertemuan dalam satu minggu. Di samping itu, kegiatan tatap muka terbatas dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi daerah masing-masing (Kemendikbud, 2021).

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud, Gubernur Jawa Timur membuat kebijakan terkait kegiatan pembelajaran melalui Surat keputusan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19 tahun 2021, pada poin ke 2 disebutkan bahwa "Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara *online* atau daring" (Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, 2021). Di samping itu, Khofifah Indar Parawansa, selaku Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa "Kegiatan pembelajaran pada tahun 2021 saat ini untuk sementara waktu masih dilakukan secara daring. Mengingat kasus Covid-19 yang terus meningkat (Suara Surabaya, 2021).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudin membuat pernyataan bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka di Jawa Timur akan meninjau dari situasi dan kondisi kasus Covid-19 pada setiap daerah. Apabila kegiatan pembelajaran tatap muka belum memungkinkan untuk dilaksanakan, maka kegiatan pembelajaran tatap muka di Jawa Timur akan ditunda. Untuk saat ini Dinas Pendidikan melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka yang diberlakukan pada kabupaten/kota masing-masing dengan program satu SMA, satu SLB, dan satu SMK serta skema pembelajaran satu kelas hanya berisi 50% peserta didik bagi daerah yang sudah menjadi zona hijau, sedangkan untuk daerah yang masih menjadi zona kuning dan orange uji coba pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan jumlah peserta didik yang hadir sebanyak 25% dari total keseluruhan peserta didik. Jumlah 25% peserta didik yang mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan peserta didik pada sekolah tersebut. Misalnya, terdapat jenjang pendidikan SMA yang memiliki 500 peserta didik dalam total keseluruhan, sehingga 25% dari 500 adalah 125 peserta didik. Adanya perbedaan jumlah total keseluruhan pada setiap sekolah akan turut mempengaruhi jumlah peserta didik yang mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka, sedangkan alokasi waktu pembelajaran hanya berlangsung dengan kurun waktu selama tiga jam dan tidak ada jam istirahat (Suara Surabaya, 2021).

Penundaan kegiatan pembelajaran tatap muka juga dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Lutfi Isa Ansori selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Surabaya dan Sidoarjo menegaskan bahwa kegiatan pembelajaran di Surabaya dan Sidoarjo saat ini masih dilaksanakan secara daring. Kebijakan tersebut mengacu pada kebijakan pemerintah. Di samping itu, saat ini pemerintah masih menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat secara kecil (mikro), sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran *offline* seperti sebelum adanya Covid-19 (Tribunnews, 2021).

Implikasi dari beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah menuntut kepemimpinan kepala sekolah untuk dapat berfikir kreatif dan inovatif serta dapat memotivasi masyarakat sekolah, baik pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik untuk mendukung pembelajaran daring (Jailani, 2020). Di samping itu, kepala sekolah dalam peranannya sebagai pemimpin (*leader*) dalam membangun atmosfir pendidikan serta pembelajaran bermakna tetap dapat dirasakan oleh peserta didik saat pandemi Covid-19 (Khairuddin, 2020). Salah satu fungsi dari kepala sekolah yaitu manajer, sehingga kepala sekolah harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah untuk mengatasi setiap permasalahan dalam pembelajaran dalam kondisi apapun (Khairuddin, 2020).

Kebijakan sistem pembelajaran daring yang telah ditetapkan sejak tahun 2020 sampai saat ini tahun 2021 bertujuan sebagai langkah strategis yang

dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19. Namun dalam proses pelaksanaan pembelajaran daring terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik bagi peserta didik atau pendidik (Anugrahana, 2020). Berdasarkan kebijakan tersebut kepala sekolah dituntut untuk membuat langkah strategi melalui kebijakan yang dimilikinya sebagai pimpinan tertinggi di sekolah untuk membuat kebijakan sistem pembelajaran daring yang efektif dan efisien saat pandemi tanpa mengabaikan protokol kesehatan dengan harapan dapat mencapai tujuan pembelajaran (Indiani, 2020). Di samping itu, kepala sekolah dituntut untuk memberikan alternatif solusi terhadap setiap permasalahan yang ada dalam pembelajaran daring agar semua peserta didik mendapatkan pendidikan yang merata (Noor, 2021).

Penelitian tentang kebijakan kepala sekolah pada pembelajaran daring saat pandemi Covid-19 sejauh ini menggunakan metode kualitatif dengan terbatas pada satu lokasi penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nonik Wulan Sawitri pada tahun 2020 dengan judul Analisis Kebijakan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Pembelajaran Daring di SDN Kagokan 01. Penelitian terdahulu ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan data bahwa kebijakan pelaksanaan pembelajaran daring di SDN Kagokan 01 sudah dapat dikatakan baik, sedangkan optimalisasi pelaksanaan pembelajaran daring belum sepenuhnya optimal sehingga hasil pembelajaran peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan sistem pelajaran daring saat pandemi Covid-19 memiliki hasil akhir yang hampir sama (Sawitri, 2020).

Berdasarkan fakta literatur di atas penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun kebaruan pada penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan sampel 5 sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Desa Sumpat dan Sarirogo, Sidoarjo, diantaranya yaitu SDN Sumpat, SDN Sarirogo, MINU (Nahdlatul Ulama) Sumpat, SMP Islam Terpadu Darul Fikri (IT DAFI) Sarirogo, dan MA Islam Terpadu Darul Fikri (IT DAFI) Sarirogo. Secara eksplisit, temuan dalam penelitian ini akan mengeksplor data tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah pada pembelajaran daring saat pandemi Covid-19, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah dalam sistem pembelajaran daring pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Desa Sumpat dan Sarirogo, Sidoarjo. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada kepala sekolah dalam membuat kebijakan yang tepat agar tujuan pendidikan Nasional tetap tercapai selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, peneliti menganggap

perlu dalam melaksanakan penelitian tentang analisis kebijakan kepala sekolah terhadap sistem pembelajaran daring saat pandemi Covid-19.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu 5 sekolah di Desa Sumput dan Sarirogo, Sidoarjo pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang melaksanakan sistem pembelajaran daring, diantaranya yaitu SDN Sumput, SDN Sarirogo, MI Nahdlatul Ulama Sarirogo, SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sarirogo, dan MA Islam Terpadu Darul Fikri Sarirogo. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 10 sekolah di Desa Sumput dan Sarirogo pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu SDN Sumput, MINU Sumput, SD Gerbang Az-Zahra Sumput, SDN Sarirogo, SMP Insan Cendekia Mandiri Sarirogo, SMA Insan Cendekia Mandiri Sarirogo, MI Darul Ulum Sarirogo, SMA Wahyuni Fersi Sarirogo, SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sarirogo, dan MA Islam Terpadu Darul Fikri Sarirogo. Penentuan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*, sehingga sampel yang diambil adalah 5 sekolah pada Desa Sumput dan Sarirogo yang melaksanakan sistem pembelajaran daring sebagai sampel penelitian yang meliputi SDN Sumput, SDN Sarirogo, MI Nahdlatul Ulama Sarirogo, SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sarirogo dan MA Islam Terpadu Darul Fikri Sarirogo. Data penelitian diperoleh dengan memberikan kuesioner secara *online* berupa *google form* sebagai instrumen penelitian yang diberikan kepada 5 kepala sekolah, serta menggunakan skala *Likert* dalam pengukurannya. Sedangkan teknik analisis data menggunakan SPSS Versi 16.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Kebijakan yang Dibuat oleh Kepala Sekolah tentang Sistem Pembelajaran Daring saat Pandemi Covid-19 pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Desa Sumput dan Sarirogo

#### *Tahap Uji Coba (Pra Penelitian)*

Sebelum melaksanakan pembagian kuesioner pada subjek asli terdapat tahap uji coba penelitian yang bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian. Tahap ini kuesioner diberikan kepada responden penelitian yang bukan merupakan subjek penelitian, akan tetapi memiliki kriteria yang hampir sama dengan subjek asli. Kuesioner pada tahap uji coba diberikan kepada 71 responden dengan 70 jenis item pernyataan. Di samping itu, pengisian kuesioner disediakan dalam bentuk *google form* dan dapat diisi secara langsung di atas kertas.

Penelitian kebijakan sistem pembelajaran daring menggunakan skala *Likert*. Menurut Sugiyono (2020) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D menjelaskan bahwa skala *Likert* merupakan skala penelitian yang berfungsi untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi dari individu atau kelompok tertentu

tentang suatu fenomena sosial yang terjadi dalam penelitian. Berikut tabel skor skala *Likert* pada Tabel 1.

**Tabel 1. Skor Favorable dan Unfavorable**

No.	Jawaban	Skor	
		Favorable	Unfavorable
1.	Sangat sesuai	5	1
2.	Sesuai	4	2
3.	Kurang sesuai	3	3
4.	Tidak sesuai	2	4
5.	Sangat tidak sesuai	1	5

Sumber: Sugiyono, 2020.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sangat Sesuai : Jika kebijakan tersebut sangat sesuai.
2. Sesuai : Jika kebijakan tersebut sesuai.
3. Kurang Sesuai : Jika kebijakan tersebut kurang sesuai.
4. Tidak Sesuai : Jika kebijakan tersebut tidak sesuai.
5. Sangat Tidak Sesuai : Jika kebijakan tersebut sangat tidak sesuai.

#### **Tahap Penelitian**

Setelah melaksanakan *try out* (uji coba) kuesioner 71 responden dengan 70 bentuk item pernyataan, tahap selanjutnya yaitu menghitung validitas dan reliabilitas kuesioner melalui SPSS. Tahap uji validitas dan reliabilitas bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner, sehingga dapat diketahui bentuk item yang valid dan gugur.

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS dari jumlah responden 71 orang yang merujuk pada *r*-tabel memiliki validitas 0,23, dengan rincian terdapat 64 item pernyataan valid dan 6 item pernyataan gugur, sedangkan reliabilitas *Cronbach's Alpha* menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Table 2. Reliability Statistics**

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.708	65

Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

Reliabilitas hasil SPSS pada Tabel 2 menunjukkan angka 0,708, sehingga kuesioner tersebut dapat dinyatakan reliabel. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Jati (2017) dalam jurnal ilmiah yang menyebutkan bahwa *cronbach's alpha* 0,708 masuk pada kategori dapat diterima atau cukup, dengan interpretasi *cronbach's alpha* yang dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai kategori *cronbach's alpha* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jika  $\alpha$  (*alpha*) lebih dari 9 maka reliabilitas sempurna.
2. Jika  $\alpha$  (*alpha*) antara 8 sampai 9 maka reliabilitas bagus.
3. Jika  $\alpha$  (*alpha*) antara 7 sampai 8 maka reliabilitas dapat diterima.
4. Jika  $\alpha$  (*alpha*) antara 6 sampai 7 maka reliabilitas dipertanyakan.

5. Jika  $\alpha$  (*alpha*) kurang dari 5 maka reliabilitas tidak dapat diterima atau rendah.

**Tabel 3. Cronbach's Alpha**

No.	Cronbach's Alpha	Internal Consistency
1.	$\alpha \geq .9$	Excellent
2.	$.9 > \alpha \geq .8$	Good
3.	$.8 > \alpha \geq .7$	Acceptable
4.	$.7 \alpha \geq .6$	Questionable
5.	$.5 > \alpha$	Unacceptable

Sumber: Setiawan, 2017.

### Analisis Pembahasan

Merujuk pada hasil uji validitas dan reliabilitas dengan data 64 item kuesioner valid dan dinyatakan reliable, maka kuesioner dalam bentuk *google form* tersebut diberikan kepada responden asli atau subjek penelitian yaitu kepala sekolah yang meliputi kepala sekolah SDN Sarirogo, SMP IT DAFI Sarirogo, MA IT DAFI Sarirogo, SDN Sumput, dan MINU Sumput. Berdasarkan hasil kuesioner 5 kepala sekolah tersebut didapatkan data persentase kebijakan sistem pembelajaran daring sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Kuesioner Kepala SDN Sarirogo**

No.	Indikator	Hasil
1.	Sarana dan Prasarana	62%
2.	Sumber Daya	61%
3.	Hubungan Antar Instansi	55%
4.	Karakteristik Pelaksanaan	52%
5.	Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik	42%

Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa kepala SDN Sarirogo pada sistem pembelajaran daring saat pandemi Covid-19 lebih banyak mengambil kebijakan dalam bentuk indikator sarana dan prasarana dengan persentase 62%, sedangkan bentuk kebijakan terendah berada pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik dengan persentase 42%.

**Tabel 5. Hasil Kuesioner Kepala MA IT DAFI Sarirogo**

No.	Indikator	Hasil
1.	Sarana dan Prasarana	51%
2.	Sumber Daya	61%
3.	Hubungan Antar Instansi	53%
4.	Karakteristik Pelaksanaan	53%
5.	Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik	50%

Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

Berdasarkan Tabel 5 dapat diambil kesimpulan bahwa kepala MA IT DAFI Sarirogo pada sistem pembelajaran daring saat pandemi Covid-19 lebih banyak membuat kebijakan pada indikator sumber daya yaitu mencapai 61%, sedangkan pengambilan kebijakan terendah berada pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memiliki jumlah persentase 50 %.

**Tabel 6. Hasil Kuesioner Kepala SMP IT DAFI Sarirogo**

No.	Indikator	Hasil
1.	Sarana dan Prasarana	55%
2.	Sumber Daya	58%
3.	Hubungan Antar Instansi	53%
4.	Karakteristik Pelaksanaan	55%
5.	Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik	42%

Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa kepala SMP IT DAFI Sarirogo pada sistem pembelajaran daring saat pandemi Covid-19 paling banyak menetapkan kebijakan pada indikator sumber daya dengan persentase 58% dan kebijakan terendah berada pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik dengan persentase 42%.

**Tabel 7. Hasil Kuesioner MINU Sumput**

No.	Indikator	Hasil
1.	Sarana dan Prasarana	54%
2.	Sumber Daya	61%
3.	Hubungan Antar Instansi	52%
4.	Karakteristik Pelaksanaan	64%
5.	Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik	47%

Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

Berdasarkan Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa kepala MINU Sumput pada sistem pembelajaran daring saat pandemi Covid-19 paling banyak membuat kebijakan dalam bentuk indikator karakteristik pelaksanaan dengan persentase 64%, sedangkan bentuk kebijakan terendah berada pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik dengan persentase 47%.

**Tabel 8. Hasil Kuesioner Kepala SDN Sumput**

No.	Indikator	Hasil
1.	Sarana dan Prasarana	58%
2.	Sumber Daya	60%
3.	Hubungan Antar Instansi	57%
4.	Karakteristik Pelaksanaan	49%
5.	Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik	46%

Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

Berdasarkan Tabel 8 dapat disimpulkan bahwa kepala SDN Sumput pada sistem pembelajaran daring saat pandemi Covid-19 paling banyak membuat kebijakan dalam bentuk indikator sumber daya dengan persentase 60%, sedangkan bentuk kebijakan terendah berada pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik dengan persentase 46%.

Berdasarkan data persentase hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa: 1) Kepala SDN Sarirogo paling banyak membuat kebijakan sistem pembelajaran daring pada indikator sarana dan prasarana dengan persentase 62% dan paling rendah pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik dengan persentase 42%; 2) Kepala MA IT DAFI Sarirogo paling banyak membuat kebijakan sistem pembelajaran daring pada indikator sumber daya dengan persentase 61% dan



paling rendah pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik dengan persentase 50%; 3) Kepala SMP IT DAFI paling banyak mengambil kebijakan sistem pembelajaran daring pada indikator sumber daya dengan persentase 58% dan paling rendah pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik dengan persentase 42%; 4) Kepala MINU Sumput paling banyak mengambil kebijakan sistem pembelajaran daring pada indikator kriteria pelaksanaan dengan persentase 64% dan paling rendah pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik dengan persentase 47%; dan 5) Kepala SDN Sumput paling banyak membuat kebijakan sistem pembelajaran daring pada indikator sumber daya dengan persentase 60% dan terendah pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik dengan persentase 46%.

Merujuk pada data yang telah dipaparkan bahwa Kepala Sekolah di Desa Sumput dan Sarirogo pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang menerapkan sistem pembelajaran daring paling banyak membuat kebijakan pada indikator sumber daya yaitu Kepala SMP IT DAFI Sarirogo (62%), Kepala MA IT DAFI Sarirogo (58%) dan Kepala SDN Sumput (60%), sedangkan Kepala SDN Sarirogo paling banyak mengambil kebijakan pada indikator standar sarana dan prasarana, serta kepala MINU Sumput pada indikator karakteristik pelaksanaan. Untuk kebijakan yang paling sedikit dibuat oleh seluruh kepala sekolah yaitu indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memiliki skor terendah.

Indikator sumber daya merupakan kebijakan yang dapat meliputi warga sekolah seperti pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan komite sekolah. Di samping itu, sumber daya di sekolah juga dapat mencakup program sekolah dan kurikulum sekolah. Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh fakta bahwa indikator sumber daya merupakan kebijakan yang paling banyak dibuat oleh kepala sekolah pada sistem pembelajaran daring. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jailani (2020) dengan judul Panduan Kepala Sekolah untuk Mengelola Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19 yang menyebutkan bahwa Kepala Sekolah yang memiliki fungsi sebagai manajer harus menyikapi pandemi dengan cerdas. Salah satunya dengan mengoptimalkan sumber daya sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran saat pandemi Covid-19 dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Apabila sumber daya sekolah dioptimalkan secara baik, maka sekolah akan mampu beradaptasi dengan kondisi apapun. Khususnya saat kondisi pandemi, sumber daya sekolah harus dioptimalkan lebih maksimal dengan cara meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta merancang kurikulum dan program sekolah yang tepat untuk diterapkan pada sistem pembelajaran daring, sehingga akan mampu melahirkan lulusan yang unggul dan berkualitas di tengah pandemi Covid-19 (Khodijah dan Haq, 2021).

Indikator sosial, ekonomi, dan politik merupakan kebijakan yang paling rendah dibuat oleh kepala sekolah. Indikator sosial dapat meliputi kebijakan

hubungan antar masyarakat sekolah atau internal sekolah dan masyarakat eksternal sekolah, indikator ekonomi dapat meliputi seluruh kegiatan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan sekolah yang dapat meliputi Dana BOS, SPP, dan lain-lain, sedangkan indikator politik merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kepala sekolah dapat berupa rencana atau program yang akan dibuat oleh tenaga pendidik yang harus mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Rendahnya kebijakan pada indikator sosial, ekonomi, dan politik disebabkan kebijakan pada indikator tersebut mayoritas mengacu pada kebijakan dari pemerintah yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang “Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19” dan Peraturan Kemendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang “Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler”, sehingga dalam hal ini kepala sekolah tidak banyak membuat perubahan atau rencana kebijakan pada indikator sosial, ekonomi, dan politik.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator yang memiliki persentase rendah pada kebijakan sistem pembelajaran daring saat pandemi. Indikator sarana dan prasarana pada sistem pembelajaran daring mencakup benda, alat atau barang yang memiliki peran dalam mendukung terselenggaranya sistem pembelajaran daring saat pandemi Covid-19. Menurut Megasari (2020) menyebutkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah sangat penting, mengingat adanya sarana dan prasarana yang terpelihara dapat mendukung sistem pembelajaran agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Khususnya pada sistem pembelajaran daring saat pandemi Covid-19, keberadaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi terselenggaranya proses pembelajaran. Sarana dan prasarana yang dapat mendukung kebijakan sistem pembelajaran daring saat pandemi Covid-19 dapat berupa pemasangan *wi-fi* di area sekolah, penambahan unit laptop/komputer, penyediaan tempat cuci tangan, masker, *hand sanitizer*, serta tersedianya media pendidikan berupa alat peraga yang mendukung kegiatan pembelajaran daring dan fasilitas studio pembuatan video pembelajaran dalam rangka mendukung efektivitas pembelajaran daring.

Indikator hubungan antar instansi merupakan salah satu indikator yang memiliki persentase rendah pada kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah dalam sistem pembelajaran daring saat pandemi Covid-19. Hubungan antar instansi dapat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, organisasi eksternal, perusahaan, dan lain-lain. Implementasi kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah pada beberapa program membutuhkan koordinasi dan dukungan dari instansi lain, sehingga kerjasama antar instansi lembaga pendidikan diperlukan untuk tercapainya keberhasilan suatu kebijakan atau program (Syariatudin, 2019). Di samping itu, saat pandemi Covid-19 hubungan antar instansi dapat terjalin antara kepala sekolah dengan sekolah lain sebagai strategi peningkatan kualitas pendidikan saat pandemi. Di samping itu, hubungan antar instansi juga dapat mencakup hubungan antara kepala sekolah dengan orang tua peserta didik.

Pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 menuntut kerjasama dari berbagai pihak agar tujuan pembelajaran saat pandemi dapat tercapai. Di sisi lain, keterlibatan orang tua peserta didik pada pembelajaran daring akan turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik, khususnya peserta didik pada Sekolah Dasar kelas 1 sampai kelas 3 yang membutuhkan arahan dan pendampingan dalam mengikuti pembelajaran daring (Budiatuti dan Mardhiyani, 2020). Keterlibatan orang tua peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sejalan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Pasal 2 No. 30 (2017) yang menyebutkan bahwa pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan memiliki beberapa tujuan, diantaranya: 1) meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan; 2) mendorong penguatan pendidikan karakter anak; 3) meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak; 4) membangun sinergitas antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat; dan 5) mewujudkan lingkungan satuan pendidikan aman, nyaman, dan menyenangkan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Karakteristik pelaksanaan merupakan indikator kebijakan kepala sekolah yang memiliki persentase yang cukup rendah diantara indikator lainnya. Karakteristik pelaksanaan dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah. Indikator karakteristik pelaksanaan mencakup pola hubungan yang terjadi di dalam lembaga pendidikan, norma-norma, dan struktur birokrasi yang memiliki pengaruh terhadap kesuksesan implementasi suatu kebijakan atau program (Syariatudin, 2019). Implementasi dari indikator karakteristik dapat berupa keterlibatan kepala sekolah mendorong pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah untuk mengikuti kegiatan seminar atau *workshop* terkait sistem pembelajaran daring guna meningkatkan kualitas SDM sekolah saat pandemi Covid-19. Di samping itu, kepala sekolah dapat mengadakan kegiatan sosialisasi sistem pembelajaran daring terhadap orang tua peserta didik atau peserta didik. Adanya perbedaan antara sistem pembelajaran tatap muka dengan sistem pembelajaran daring menyebabkan kepala sekolah dirasa perlu untuk membuat aturan baru selama menggunakan sistem pembelajaran daring saat pandemi Covid-19 yang diperuntukkan bagi seluruh sumber daya di sekolah demi terselenggaranya sistem pembelajaran daring sesuai dengan tujuan dan harapan bersama.

## **PENUTUP/SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa bentuk kebijakan yang paling banyak diambil oleh kepala sekolah yaitu pada indikator sumber daya dengan rincian dari 5 kepala sekolah yang terdiri dari SDN Sumput, SDN Sarirogo, MI Nahdlatul Ulama Sarirogo, SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sarirogo, dan MA Islam Terpadu Darul Fikri Sarirogo, 3 diantaranya (SDN Sumput, SMP Islam Terpadu Darul

Fikri Sarirogo dan MA Islam Terpadu Darul Fikri Sarirogo) memiliki skor tertinggi pada indikator sumber daya, sedangkan bentuk kebijakan paling sedikit yaitu pada indikator sosial, ekonomi, dan politik dengan rincian dari 5 kepala sekolah semuanya memiliki skor terendah pada indikator sosial, ekonomi, dan politik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anugrahana, A. (2020). Hambatan, Solusi dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 oleh Guru Sekolah Dasar. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(3), 283. <https://doi.org/10.24246/j.js.2020.v10.i3.p282-289>.
- Engkus, dkk. (2019). Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran dan Dampak Sosial Ekonomi di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1690. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30820>.
- Indiani, B. (2020). Mengoptimalkan Proses Pembelajaran dengan Media Daring pada Masa Pandemi Covid-19. *Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan*, 1(3), 227. <https://ojs.bpsdmsulsel.id/index.php/sipatokkong/article/view/55>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Terbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). PTM Terbatas Bukan Sekolah Seperti Biasa. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/06/mendikbudristek-ptm-terbatas-bukan-sekolah-seperti-biasa>.
- Khairuddin. (2020). Kepemimpinan Kepala Sekolah ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan "Edukasi,"* 8(2), 178. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/judek/article/view/1161>.
- Khodijah, S., dan Haq, M. S. (2021). Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 09(1), 158. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/38605>.
- Lilie Budiastuti dan Nur Laili Mardhiyani, W. (2020). Komunikasi Empatik dalam Relasi Guru dengan Orang Tua pada Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Studi pada SD Muhammadiyah 08. *Jurnal Sosfilkom*, 2(2), 114. <https://ojs3.umc.ac.id/index.php/SFK/article/view/1957>.
- Mansyur, A. R. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Dinamika Pembelajaran di Indonesia. *Education and Learning Journal*, 1(2), 113. <https://dx.doi.org/1033096/eljour.v1i2.55>.

- Muhammad Jailani, S. F. dan D. (2020). Panduan Kepala Sekolah untuk Mengelola Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan*, 15(2), 58. <https://doi.org/10.24246/j.js.2020.v10.i3.p282-289>.
- Noor, T. R. dan E. A. (2021). Strategi Solutif Kepala Sekolah pada Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19 di SDN Sumpat, Sidoarjo. *Jurnal Al- Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, IX(1), 20. <https://dx.doi.org/10.31958/jaf.v9i1.2658>.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Pasal 2 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta. Diakses dari <https://jdih.kemdikbud.go.id>.
- Ratu, D., Uswatun, A., dan Pramudibyanto, H. (2020). Pendidikan dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Sinestesia*, 10(1), 47. <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/44>.
- Sawitri, N. W. (2020). Analisis Kebijakan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Pembelajaran Daring. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta). Diakses dari <https://eprints.ums.ac.id>.
- Setiawan, H. dan H. J. (2017). Analisis Kualitas Sistem Informasi Pantauan Pembentukan Karakter Siswa Di SMKN 2 Depok Sleman. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 2(1), 106. <https://doi.org/10.21831/elinvo.v2i1.16427>.
- Suara Surabaya. (2021). Gubernur Belum Putuskan Pembelajaran Tatap Muka di Jatim. Diakses dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/gubernur-belum-putuskan-pembelajaran-tatap-muka-di-jatim/>.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syariatudin. (2019). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 7(4), 370.
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur. (2021). Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Mengendalikan Penyebaran Covid-19. Nomor 188/7/KPTS/031/2021. Diakses dari <http://dokumjdih.jatimprov.go.id>.
- Tribunnews. (2021). Dindik Jatim Belum Bisa Pastikan Kapan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka untuk Jenjang SMA/SMK. Diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com/2021/03/09/dindik-jatim-belum-bisa-pastikan-kapan-pelaksanaan-pembelajaran-tatap-muka-untuk-jenjang-smasmk>.